

## Tinjauan Historis: Konformitas Pasar Tradisional versus Konsep Global Pembangunan Dunia

### *The Historical Analysis: The Conformity of Traditional Market versus Global Concept on World Development*

Sayfa Auliya Achidsti\*  
Universitas Gajah Mada

**Abstract.** The world has experienced many developments of each economic model. The interesting thing is that, the worldwide economic development tend to be a linear development. If we see on the past, e.g. several centuries ago, the economy in the world is all on the pure form of trading. Every area, with its own communities, has different natural resources and their own made-craft. Because of the difference in the community and natural resources each area has, it results on the commodity differentiation. It can not be denied that as the time goes by, human's needs will also develop not only in the sense of housing, clothes, and food needs but it is beyond those needs. The needs for other things and the eminence of each area of its natural resources are the factors which are finally emerging the need of exchange by inter-individuals on each area and to other areas. This is what we called as trading, in advance. By the existence of this kind of trading and the certainty of place and system, these result on the existence of what we call now as market. In the modernity context, what is explained as market here is a traditional market. The question is the existence of traditional market still relevant in the daily economic model, in which nowadays we are not in the peak time of traditional market anymore? Trading model which has capital source and orientation is being the focus of today's economy.

*Key words:* globalization, traditional market, Indonesian economic history, social-class  
*JEL classifications:* : P00, N00

#### PENDAHULUAN

Kajian ini merupakan telaah singkat mengenai bagaimana gambaran aktivitas perekonomian di Nusantara yang telah berlangsung sejak beberapa abad lalu hingga masa pasca-kolonialisme. Kajian historis ini menjadi penting karena dilakukan dengan analisis dari beberapa sudut pandang yang mengarah pada persoalan perekonomian Nusantara dalam artian yang luas. Bagaimanapun, jika bicara perihal persoalan ekonomi menjadi cukup rumit dalam merangkai pecahan-pecahan fakta historis dalam kerangka yang saling berhubungan dalam koridor analisis sosio-ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh karena Nusantara telah melewati beberapa zaman, yang di tiap-tiap zaman berlaku logika dan pemahaman mengenai polanya masing-masing.

Dengan beragamnya fakta sejarah, maka kajian ini menggunakan metode pengumpulan fakta sejarah dan pemikiran mengenainya yang kemudian dirangkum dan dianalisis dalam koridor pembahasan mengenai pasar tradisional dan konformitasnya dalam aktivitas per-

\*Alamat korespondensi: Perumahan Griya Abimana I Nomor A-1, Jalan Imogiri Timur Km.7 Grojogan-Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia. Email: achidsti.sayfa@yahoo.com atau achidsti.sayfa@gmail.com.

ekonomian kontemporer. Dalam ilmu sosial, konformitas memiliki pemaknaan yang luas; yang dalam kajian ini dimaknai sebagai sebuah "keterpaksaan" untuk tetap hidup. Penyebabnya adalah persoalan yang telah diketahui secara umum, yaitu terdesaknya pola-pola lama yang manual dengan tren perkembangan teknologi dan komunikasi yang memaksa pola lama tersebut pudar demi alasan efektivitas dan efisiensi produksi-konsumsi. Globalisasi telah menjadi keharusan zaman walaupun hal tersebut telah terjadi dan terkategori secara periodik; dan globalisasi muncul dalam bentuk yang berbeda-beda menurut zamannya. Terkait hal tersebut, Nusantara pada masa kejayaannya dulu telah mengalami dan menunggangi globalisasi; dengan Malaka sebagai titik porosnya.

Nusantara, paling tidak dalam kisaran beberapa abad lalu, merupakan tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di seluruh belahan dunia. Terlebih karena mempunyai daerah Malaka, perkembangan perekonomian Nusantara—saat itu belum bernama "Indonesia"—berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor strategis, salah satunya karena Malaka pada saat itu berperan sebagai pintu masuk bagi pedagang dari Timur Tengah dan India yang menuju ke arah Asia Timur, dan juga sebaliknya, dan bagi para pedagang Cina yang memilih jalur laut yang akan berlayar menuju Nusantara dan Timur Tengah. Malaka<sup>1</sup> menjadi tempat peristirahatan bagi para pedagang sekaligus menjual sebagian barangnya di pelabuhan. Selain Malaka, Samudera Pasai sebagai sebuah kerajaan di ujung utara pulau Sumatera pun menjadi semacam portal bagi para pedagang yang akan lewat. Menurut penelitian Lombard, pada perkembangannya wilayah Asia Tenggara ini maju pesat dalam hal perdagangan. Lalu lintas yang sangat strategis memungkinkan beberapa tempat memonopoli dari segi wilayah dan regulasi perdagangan (Lombard, 2008a).

Namun yang perlu diingat adalah bahwa pada masa itu semua perdagangan yang dilakukan, baik lewat darat maupun laut, harus benar-benar menyesuaikan dengan alam. Hal seperti ini jelas sebagai konsekuensi atas belum adanya peralatan transportasi yang canggih yang sanggup memanipulasi perjalanan perdagangan. Perjalanan menjadi lebih rumit jika melalui laut. Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa perdagangan laut Malaka pada saat itu sangat bergantung pada sistem angin yang berlaku di Asia Selatan, Tenggara, dan Timur. Arah angin itulah yang mempengaruhi jalur navigasi yang ditempuh berdasarkan siklus musim panas dan dingin di daratan Asia, khususnya bagi Indonesia pada siklus di Australia (Kartodirdjo, 1988). Adanya siklus yang pada saat itu belum bisa dimanipulasi menimbulkan konsekuensi bahwa perbedaan musim dan angin akan menentukan perbedaan rombongan pedagang dan komoditasnya pula. Dalam konteks Malaka<sup>2</sup>, adanya fenomena ini menyebabkan munculnya kebutuhan penyimpanan barang dagang untuk menyasati jarak antara periode kedatangan pedagang dan pembelinya. Inilah yang dimaksud sebagai "monopoli", ketika Malaka menjalankan perannya sebagai sebuah emporium dengan berbagai kelebihan sebagai tempat pertemuan pedagang dari seluruh belahan dunia (Kartodirdjo, 1988).

Hal yang cukup menarik dari perdagangan masa silam justru datang dari keterbatasannya itu sendiri. Setiap pedagang memiliki komoditas yang berbeda yang disebabkan oleh perbedaan tempat asal sesuai sumberdaya unggulannya. Seperti misalnya wilayah Nusantara dengan komoditas unggulan rempah-rempah dan Cina dengan porselinnya. Bisa

<sup>1</sup>Pada saat itu sebutan Malaka dalam konteks perdagangan cenderung diartikan sebagai sebuah wilayah laut (selat antara Sumatera dan Malaysia sekarang) dan daerah pantai (pesisir) di pinggir-pinggirnya.

<sup>2</sup>Pembahasan mengenai Malaka dalam artikel ini disebabkan oleh karena Malaka pada saat itu merupakan pusat perdagangan Nusantara, bahkan Asia Tenggara.

gara) menjual porselin, namun ini akan membuat biaya produksi akan melambung dan keuntungan yang didapat pun tidak maksimal. Dengan adanya keuntungan berupa berbedanya sumberdaya tiap-tiap daerah, maka masing-masing pedagang dapat memanfaatkan secara maksimal hal tersebut. Hal inilah yang disebut dengan keuntungan komparatif yang kemudian berkembang menjadi faktor yang signifikan dalam aktivitas dan permainan posisi tawar perekonomian. Tempat pertemuan dua atau lebih komoditas itulah yang pada akhirnya disebut dengan pasar.

### **POLA DAN KEBIASAAN KARENA "PASAR"**

Dari sisi historis, terdapat beberapa hal yang unik dalam pembentukan pasar. Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa pasar terbentuk dari suatu proses terkait fungsinya. Jadi, pasar muncul lambat laun sesuai kebutuhan dan kondisi di mana beberapa orang membutuhkan barang tertentu dan orang lain ternyata menyediakannya; dan juga kondisi lain—salah satunya alam—yang turut berperan dalam sistem yang akhirnya berkembang menjadi pasar.

Terkait persoalan kepemilikan modal, terdapat analisa yang menarik dari masa ini. Polarisasi kelas sosio-ekonomi telah terbentuk bahkan sebelum terbentuknya Nusantara sebagai sebuah entitas negara yang merupakan suatu sistem politik yang legal. Pada masa itu telah ada pembagian "kelas" pedagang antara asing—dengan kelompok *bourgeois* Cina yang paling kuat—dan pribumi. Richard Robinson berpendapat bahwa kapitalisme dalam bentuknya yang luas telah memproduksi empat tipe berbeda pada borjuasi kontemporer di Indonesia yang erat hubungannya dengan perekonomian pra- dan pasca-kolonialisme yaitu muslim, kelompok birokrat sipil, kelompok birokrat militer, dan kekuatan asing (Robinson, 1978).

Berbagai budaya berkumpul dan berkembang menjadi satu entitas budaya yang lain dari budaya asal masing-masing. Hal ini karena pasar merupakan *rendezvous* para pedagang (Kartodirdjo, 1988). Inilah yang kemudian berkembang dan terakulturasi budaya "asli" Nusantara menjadi sebuah sistem dan komunikasi baru. Sebagai contoh adalah pembauran budaya kepercayaan patrimonial Nusantara dengan model dagang dari pedagang Timur Tengah. Pembauran dua budaya oralitas di mana dari pihak pedagang Timur Tengah yang mempergunakan perdagangan juga sebagai media penyebaran dakwah, memungkinkan model komunikasi dalam pasar menjadi unik. Komunikasi oral dan kepercayaan (*truth*) adalah hal yang berperan dominan dalam berjalannya kegiatan perdagangan di pasar. Oleh karena itu patut dimaklumi bahwa orang-orang Eropa yang datang untuk berdagang ke Nusantara terkejut ketika turun dari kapalnya. Lombard pun cukup "heran" dan menuliskan fenomena ini ke dalam beberapa bagian dalam catatannya "*Nusa Jawa: Silang Budaya*"<sup>3</sup>.

Bagaimana mungkin orang-orang Eropa itu akan begitu saja percaya memberikan uang mukanya yang begitu besar, sedangkan perjanjian yang dilakukan antara keduanya hanya berwujud akad (janji lisan). Hal inilah yang sudah terjadi umum di pasar kita dan mungkin sangat aneh bagi orang asing di kemudian hari. Dalam beberapa konteks kehidupan, pasar menjadi sebuah sentra pembentukan kebiasaan dan sistem yang berlaku dalam masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh, perdagangan beberapa abad silam telah menjembatani pertemuan berbagai budaya yang dibawa oleh pedagang dari berbagai daerah asal yang

<sup>3</sup>Buku bermodel serial tematik karangan Denys Lombard tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam tiga jilid *Le Carrefour Javanais* (Nusa Jawa: Silang Budaya, terj.). Edisi I (Batas-Batas Pembaratan/*Le limited de l'occidentalisation*); edisi II (Jaringan Asia/*Les reseaux asiatiques*), dan edisi III (Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris/*L'herirage des royaumes concentriques*). Judul asli buku dalam bahasa Perancis, lihat dalam Denys Lombard, *Le Carrefour Javanais* (Paris: Ecole des Hautes Etudes en Siences Sociales, 1990).

berbeda. Pertemuan berbagai budaya ini menyebabkan terbentuknya sebuah keterbukaan dalam paradigma adat istiadatnya. Tentunya hal ini akan berkembang dengan sendirinya mengingat tidak akan mungkin sebuah paradigma dan pola pikir yang kaku dan tertutup akan tetap bertahan dengan banyaknya "invasi" budaya yang masuk. Oleh karena itulah, meminjam istilah Lombard dalam "Nusa Jawa" tersebut (Lombard, 2008a), terjadi perkembangan penyebutan mengenai dikotomi pembagian wilayah dalam sebuah pulau: pesisir dan pedalaman.

Hal tersebut berkembang secara pelan namun pasti, yang kemudian membentuk mentalitas geopolitik masing-masing kelompok sosial yang tinggal di lingkungan bersangkutan. Walaupun memang tipikal di Nusantara ini memiliki ciri tersendiri yang membedakan dengan daerah lain, tetapi pada banyak sisi, geopolitik di Nusantara secara umum memiliki kesamaan dengan kota-kota di Asia<sup>4</sup>. Terdapat tiga tipe umum geopolitik Nusantara. Pertama, pemukiman dan kampung yang ditinggali para sanak keluarga kerajaan. Daerah ini penuh dengan fasilitas, oleh karena itu, tingkat kesejahteraannya pun relatif tinggi. Kedua, area pemukiman dan pemerintahan kaum kolonialis, pedagang dan pelancong. "Kampung" ini seringkali disebut dengan kampung Belanda, kampung Pecinan, kampung Arab dan lain-lain. Terakhir, kampung yang berhubungan dengan mata pencaharian, misalnya kampung buruh, kampung seniman, kampung para prajurit dan lain-lain.

Pesisir sebagai sebuah wilayah pelabuhan dan sekitarnya menjadi terpengaruh oleh budaya di pelabuhan tersebut. Pelabuhan yang kecil lama-kelamaan berkembang menjadi besar, bahkan menjadi sebuah kota yang berbasis perdagangan. Contoh Malaka sebagai salah satu pelabuhan paling strategis di dunia pada saat itu; atau juga di salah satu bagian di Pulau Jawa seperti Tuban, Gresik, Rembang dan Surabaya yang kesemuanya ini termasuk daerah pesisir (Kartodirdjo, 1988). Tipikal daerah pesisir ini berbeda dengan daerah pedalaman yang tidak memiliki pelabuhan. Sistem dan pola kemasyarakatan yang berkembang di pesisir lebih dinamis dan "kenyal" serta mengarah pada pluralitas, sedangkan di daerah pedalaman, pola yang berkembang lebih statis dan kaku. Hal ini senada dengan penelitian Lombard di sekitar Jawa yang menyebutkan bahwa pola kebudayaan dan seni keraton di pedalaman Jawa tidak "sekenyal" pesisir yang "liar" dengan isme-ismenya (Lombard, 2008a). Seni, baik secara bentuk fisik maupun tradisi, lebih banyak ragamnya dan cenderung berorientasi pada "paham" seni untuk rakyat (seni rakyat). Ciri khas pesisir juga tercermin dalam tingkah laku para priyainya yang merupakan raja-raja kecil. Priyayi pesisir cenderung lebih agresif untuk memperluas pengaruhnya dengan cenderung memberikan "proyek filantropis" kepada daerah sekitarnya demi memperoleh simpati. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme yang mengubah struktur dalam masyarakat.

Priyayi yang tadinya sebagai para "yayi" (asal kata priyayi) yang mempunyai arti para adik raja menjadi kabur dalam perkembangannya.<sup>5</sup> Tidak setiap orang bisa mendapatkan gelar priyayi. Gelar kebangsawanan seperti Raden Mas atau Raden bukan hanya karena jabatan dalam pemerintahan, tetapi lebih pada faktor keturunan. Namun, pada perkembangannya gelar kepriyayian bisa didapatkan karena pemberian jabatan oleh pemerintahan kolonial (Kartodirdjo *et al.*, 1987). Hal inilah yang menyebabkan perbedaan kekuatan dari sisi kharisma personal antara priyayi pangreh praja (pegawai pemerintahan atau administratif) dengan priyayi karena faktor genetika keturunan<sup>6</sup>. Karena hal ini pula, dari sisi "agresiv-

<sup>4</sup>Catatan John Sullivan pada perjalanan penelitiannya pada tahun 1975 dan 1979 di Jawa.

<sup>5</sup>*Para yayi* = para adik. Yang dimaksud dari priyayi pada mulanya adalah para adik atau saudara dan kerabat dari raja.

<sup>6</sup>Pemerintahan kolonial membuat kepanjangan tangannya di masing-masing wilayah dengan membuat raden-

itas" priyayi baru pesisir tersebut lebih bersemangat untuk melakukan banyak kegiatan yang dirasa dapat menguatkan kedudukan dan memperbanyak pengikutnya (kawula). Mengenai dikotomi pesisir-pedalaman, Koentjaraningrat menjelaskan bahwa di Indonesia (Nusantara) konsepsi tentang struktur kenegaraan dan tentang arti dari raja ini juga diambil alih tidak oleh semua tipe negara, tetapi terutama oleh negara-negara pedalaman yang ekonominya lebih berdasarkan sistem agraria yang memaksimalkan guna lahan sebagai pertanian (Koentjaraningrat, 1979).

Walaupun sampai pada era kolonial sistem dalam perdagangan di Nusantara sudah begitu berkembang, pada umumnya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakatnya masih bersifat subsisten. Terlebih pada perdagangan yang dilakukan oleh sesama masyarakat di Nusantara sendiri, hal ini terlihat semakin jelas. Keceragaman dari segi pekerjaan masing-masing yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian pun membentuk sebuah homogenitas tersendiri, yang pada akhirnya menimbulkan semangat komunal dan solidaritas yang cukup kuat antarindividu. Dari homogenitas itulah maka berkembang pula sistem tukar-menukar tenaga dan jasa berdasarkan prinsip timbal balik, sistem *sumbangan rewang*, *tolong-menolong punjungan* (gotong royong). Dari sini terlihat bahwa tujuan utama kegiatan perdagangan masih sebatas pada pemenuhan kebutuhan saja, dan pencarian keuntungan belum sepenuhnya menjadi tujuan dari kegiatan perdagangan. Karena itu pada masa tersebut, untuk beberapa usaha produksi bahkan tidak diperlukan uang sebagai upah. Tenaga dapat dikerahkan dengan adanya prinsip pertukaran atau yang sekarang kita sebut sebagai barter (Kartodirdjo *et al.*, 1987). Sebuah fenomena unik dalam komunikasi di pasar tradisional jika dibandingkan dengan pasar "modern" di mana keakraban di pasar tradisional lebih terasa. Walaupun mungkin ini adalah sebuah ucapan hiperbolik karena tidak selalu juga keakraban seperti yang dibayangkan terjadi di pasar, beberapa komunikasi mempunyai nuansa pembicaraan yang lebih "manusiawi" dengan adanya saling tatap muka dan pendekatan personal. Dalam sudut pandang sosiologis, kondisi kondusif komunikasi seperti itu dikatakan Agus Salim sebagai sebuah semangat kebersamaan yang merupakan sebuah nilai substansial dalam kepribadian mereka (Salim, 2008).

#### AKTIVITAS EKONOMI PRA- DAN PASCA- KOLONIALISME

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pasar pada mulanya terjadi karena mengikuti prinsip subsisten dari beberapa individu. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan padahal terdapat keterbatasan dimiliki di satu sisi dan diferensiasi sumberdaya masing-masing di sisi lainnya, akhirnya muncullah kebutuhan akan pertukaran barang. Dengan semakin berkembangnya pula sistem pertukaran tersebut, barulah kemudian kesadaran akan keuntungan pertukaran muncul. Dari sini, sumberdaya dan kekayaan alam masing-masing daerah sangatlah besar peranannya dalam perdagangan. Semua pedagang dari berbagai belahan dunia mempunyai kesempatan yang sama untuk saling bertatap muka dan saling bertukar komoditas dagangnya masing-masing. Hal ini karena masing-masing pedagang dari daerah tertentu mempunyai jenis barangnya sendiri untuk dipertukarkan dengan yang lainnya dengan adanya prinsip keuntungan komparatif tersebut. Oleh sebab ini maka dapat dipahami mengapa sejarawan Fernand Braudel berpendapat bahwa antara tiga sampai empat abad yang lalu sama sekali tidak ada kesenjangan ekonomi antara masyarakat Eropa dengan wilayah lain di bumi ini. Pedagang Asia memainkan peranan yang sebanding dengan pedagang Eropa dalam perdagangan dunia (Nugroho, 2001).

---

raden baru yang masuk sebagai *ambtenaar* atau pegawai pemerintahan (untuk pihak kolonial tentunya). Hal ini mendapatkan justifikasi terlebih lagi dengan adanya simpati terhadap Kartini yang menimbulkan politik etis yang salah satu programnya adalah menyekolahkan kaum bumi putera (tentunya hanya sebagian dari pribumi yang dapat bersekolah).

Kondisi semacam ini di Nusantara mulai berubah sedikit demi sedikit pada saat kolonialisme muncul. Eropa yang pada mulanya datang ke wilayah Nusantara dengan niat berdagang mencari daerah penghasil rempah-rempah menjadi berniat untuk memonopoli, bahkan kemudian tidak hanya dari sumberdaya alamnya saja, tetapi termasuk juga sumberdaya manusianya. Hal inilah yang kemudian dinamakan dengan imperialisme ekonomi.

Bangsa Eropa yang pertama mendarat adalah Portugis di bawah pimpinan Alfonso d' Albuquerque, tiba di Sumatera Utara pada tahun 1509. Setelah itu beberapa bangsa lain juga seakan ikut "antri" untuk menguasai wilayah kepulauan yang dikatakan sebagai "jamrud khatulistiwa" ini. Menjelang akhir abad 16, muncullah pesaing-pesaing lain yaitu Inggris, Perancis dan Belanda.

Setelah bersatu dan membentuk negara federasi di daratan Eropa di bawah Protestanisme, Belanda mulai mengembangkan ambisi koloninya dan mulai membuat sengketa dengan pesaingnya di wilayah luar negerinya. Di bawah komando Cornelis de Houtman mendaratlah sebuah armada Belanda pada 1596 di Banten, Jawa Barat (Wibawa, 2001).

Dimulailah pembentukan sebuah "perusahaan" oleh pihak Belanda sebagai bentuk keseriusan perdagangannya di Nusantara, VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), pada tahun 1602. VOC mempunyai bentuk semacam perseroan terbatas (*aktiongesellschaften*) yang pertama dalam sejarah, dengan modal awal 6,5 juta Gulden. Kemudian oleh Staten General (semacam badan perwakilan negara-negara bagian dan golongan yang menguasai kedaulatan dalam struktur negara Belanda), perusahaan ini diberi monopoli yang tidak terbatas. Bahkan VOC diberi wewenang mewakili pemerintah Belanda untuk membuat perserikatan dan perjanjian dengan suatu pemerintahan, menduduki suatu lokasi, membangun pemukiman dan pusat perdagangan, mengangkat gubernur dan pegawainya, serta membentuk militernya sendiri (Wibawa, 2001).

Penetrasi kolonialisme dengan imperialismenya telah begitu memasuki bangsa kita. Untuk melanggengkan kekuasaannya agar tetap bertahan di Nusantara, pihak kolonial pun seperti bermain catur, "menjalankan satu pion dengan tujuh kemungkinan langkah selanjutnya" yang sudah dibayangkan dan diatasi. Penjajah Belanda memanfaatkan strategi hegemoni untuk menguasai tanpa represi yang melelahkan. Apa yang dilakukan pihak kolonial rupanya cukup senada dengan logika berpikir Gramsci bahwa penguasa memerintah tidak dengan kekerasan (atau dengan kekerasan semata-mata) melainkan secara persuasif yang mungkin lebih tidak disadari oleh objeknya (Burke, 2003). Strategi hegemoni kaum penjajah untuk tetap menguasai bangsa ini secara mudah adalah dengan membuat "penguasa-penguasa" lokal baru yang sejatinya itu bukan seorang penguasa sama sekali bagi pihak kolonial. "Penguasa-penguasa" lokal itu digunakan oleh Belanda untuk memegang penduduk sekitarnya dan memudahkan mereka untuk mengontrol berapa banyak orang hanya dengan menyerahkannya kepada satu orang tersebut. Belanda mendidik para pemuda dalam sekolah Belanda yang kemudian menjadi *ambtenaar* (pegawai Belanda). Priyayi *ambtenaar* ini berbeda dengan priyayi "asli" yang dididik di pesantren. Tetapi, priyayi *ambtenaar* ini dididik secara Belanda dan diajari membenci segala yang berbau pribumi dan agama yang merupakan karakter para santri.<sup>7</sup> Hal inilah yang kemudian pada beberapa tingkatan juga dapat menjelaskan psikologi priyayi dan kaum pesisir yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kolonialisme multidimensional ini benar-benar sukses menyedot sumberdaya yang ada di

<sup>7</sup>Mun'im D. Z., dalam: [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)

Nusantara. Kebijakan *culturstesel* misalnya, amat memaksimalkan salah satu sumberdaya yang cukup berlimpah di Nusantara: lahan dan tenaga kerja gratis. *Culturstesel* adalah suatu kebijakan ketika Belanda mewajibkan para petani untuk menyisihkan beberapa lahan miliknya untuk ditanami tanaman tertentu pada saat itu. Kebijakan ini diterapkan khususnya di Pulau Jawa pada sekitar tahun 1830 yang merupakan manifestasi "spesialisasi paksaan" (*forced specialization*) yang didasarkan pada analisis manfaat komparatif Ricardo oleh pihak penjajah. Hal ini dijalankan dengan cara meminimalkan biaya secara ekstrem dengan mengeksploitasi dan mobilisasi paksa (Arif, 2006). Surplus ekspor sebagai hasil dari *culturstesel* tercatat berjumlah sebesar 781 juta Gulden dalam periode 1840-1875 dan 3,3 milyar Gulden pada periode 1915-1920. Tidak berbeda seperti sistem perpajakan, dengan mengutip studi Welleinstein, Hatta mendapatkan data bahwa beban pajak petani bertanah di Jawa dan Madura setelah memperhitungkan pajak tanah mencapai kisaran 40 persen dari pendapatan kasar (Arif, 2006).

Kajian historis di atas membawa implikasi pada peta sosio-ekonomi masyarakat di Nusantara, khususnya di Jawa, terkait dengan kelas dalam masyarakat. H. W. Dick, dalam komentarnya mengenai kelas menengah di Nusantara, mengatakan bahwa era kolonialisme turut andil dalam membentuk disparitas kemampuan antarindividu di desa dan kota, yang kelak menimbulkan polarisasi dalam kelas sosio-ekonomi; *borjuasi* pada kelompok yang dapat bertahan dan memanfaatkan kondisi, dan masyarakat akar-rumput yang dimanfaatkan sistem (Dick, 1987). Tabel 1 mengenai pengeluaran rata-rata bulanan di perkotaan di Jawa pada sekitar tahun 1978 sedikit banyak menggambarkan pendapat Dick tersebut. Kelas menengah dalam struktur masyarakat dapat menikmati pendidikan, kesejahteraan, dan segelintir kekuasaan yang memposisikannya sistem aristokrasi. Dalam hal ini, aristokrasi lokal kemudian menjalin hubungan simbiosis dengan pihak pemerintahan kolonial, yang saling melanggengkan kekuasaan masing-masing pihak.

Mengacu pada gaya hidup materialistis, dalam tabel tersebut terlihat indikasi mengenai kondisi kelas menengah. Secara definitif, kelas menengah adalah 16,6 persen dari individu di kota-kota Jawa yang mengeluarkan lebih dari Rp15.000 per bulan pada tahun 1978. Distribusi pengeluaran mereka pun dapat terlihat; pada saat pengeluaran sembako sedikit di atas rata-rata, tidak demikian halnya untuk beberapa jenis pengeluaran yang cukup jauh di atas rata-rata seperti untuk "makanan lain-lain" (termasuk barang mewah seperti daging, keju, dan alkohol), perumahan dan "lain-lain". Kelas menengah tersebut pada dasarnya adalah fenomena kehidupan perkotaan yang diperlihatkan dengan kenyataan bahwa hanya 1,1 persen dari keseluruhan area perkotaan yang pengeluarannya lebih besar dari Rp15.000 dan banyak dari kenyataan tersebut kemungkinan tercatat bukan teridentifikasi sebagai kelompok petani kaya, namun "tumpahan" dari aktivitas dasar perkotaan ke dalam daerah pedesaan (Dick, 1987). Aktivitas perekonomian kaum kolonial mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap kultur masyarakat Nusantara dalam hal terbentuknya kelas sosial khususnya di Jawa. Hal ini dapat dimengerti karena Nusantara sebagai penghasil sumberdaya yang melimpah, juga merupakan pasar yang besar bagi hasil produksi kaum kolonial. Ini senada dengan prinsip imperialisme dalam memandang sebuah wilayah koloni, bahwa di samping sebagai daerah penyedia sumberdaya juga sebagai tempat penjualan hasil produksi. Sritua Arif dalam bukunya "Negeri Terjajah" menyimpulkan dengan cukup keras bahwa imperialisme Eropa Barat terhadap berbagai negeri di Asia, Afrika dan Amerika Latin merupakan implikasi kebijakan dari teori ekonomi klasik dengan proses produksi dan akumulasi hanya akan berhenti apabila pasar atas hasil produksinya semakin terbatas (Arif, 2006). Untuk itu kebutuhan akan ekspansi pasar semakin terasa; yaitu kebutuhan untuk pemasaran hasil produksi yang baru. Produktivitas yang terus berkembang

Tabel 1. Pengeluaran Masyarakat Jawa di Perkotaan pada Tahun 1978

P	<2.000	2-2.999	3-3.999	4-4.999	5-5.999	6-7.999	8-9.999	10-14.999	>15.000	Rata-rata
B	2,1	7,5	12,2	9,3	9,7	16,6	10,5	15,5	16,6	100%
M	755	1.048	1.211	1.265	1.317	1.362	1.398	1.495	1.679	1.370
MLL	486	932	1.396	1.881	2.422	3.144	4.058	5.299	9.338	3.982
P	33	67	122	184	215	297	382	526	1.139	419
PR	245	367	534	781	937	1.276	1.778	2.621	8.138	2.423
PJ	7	17	25	35	59	81	125	223	658	184
L	69	122	230	377	485	815	1.163	1.957	6.388	1.744
TN	354	573	911	1.377	1.732	2.469	3.448	5.327	16.323	4.770
T	1.615	2.553	3.518	4.523	5.471	6.975	8.904	12.121	27.340	10.122

P= Pengeluaran (Rp/bulan), B= Barang, MP= Makanan Pokok, MLL=Makanan Lain-Lain,

P= Pakaian, PR=Perumahan, PJ= Pajak dan Jaminan, L= Lain-lain, TN= Total Nonmakanan, T=Total

merupakan sebuah hal yang sangat diharapkan. Namun, jika perkembangan produktivitas tersebut tidak dibarengi dengan penambahan permintaan, maka akan terjadi ketimpangan hubungan *demand-supply*, di mana penawaran (hasil produksi) lebih besar daripada permintaan (*excess supply*). Inilah yang menggeser motivasi berdagang dari yang sebelumnya pemenuhan akan kebutuhan subsisten menjadi motivasi memaksimalkan keuntungan. Hal ini terkait pada sebuah proses yang bernama globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses "penyamaan", penghilangan batas-batas antar wilayah demi tercapainya keefektifan dan keefisienan dalam perdagangan dengan manipulasi dalam segi administratif maupun komunikasi dan teknologi. Globalisasi yang nampak pada era ini adalah globalisasi dalam hal ekonomi, selain juga pada hal komunikasi dan teknologi<sup>8</sup>. Proses ini tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari proses sejarah, yang meningkatkan arus perdagangan internasional, arus keuangan internasional yang masif, dan kegiatan multinasional yang semakin mengikat perekonomian antarnegara (Gilpin dan Gilpin, 2002).

Salah satu konsekuensi peleburan batas pemisah antarwilayah di dunia demi kelancaran perdagangan adalah pengurangan regulasi yang merupakan garda depan pelindung batas tersebut. Para ekonom tidak mempunyai argumen yang sama akan hal ini, sebagian diantaranya setuju dan yang lain tidak setuju terhadap ide ini bahkan berpendapat bahwa keuangan internasional tanpa regulasi merupakan ancaman serius bagi ekonomi dunia. Tetapi mayoritas ekonom mempercayai bahwa globalisasi menjanjikan dunia yang lebih sejahtera dan kerjasama internasional yang semakin meningkat sehingga mereka tidak membolehkan adanya sesuatu yang dapat menghalangi proses ini (Gilpin dan Gilpin, 2002).

Proses pergulatan pemikiran pro dan kontra ini tetap berjalan, walaupun begitu terdapat beberapa perspektif tentangnya yang dinyatakan oleh Robert dan Jean. Pertama adalah perspektif pasar bebas. Cara pandang ini menganggap bahwa globalisasi dan Amerikanisasi telah melepaskan kekuatan ekonomi yang terkekang menuju pada efisiensi penggunaan sumberdaya manusia sehingga kemakmuran dunia dan keuntungan ekonomi akan dicapai oleh seluruh masyarakat. Berlawanan dengan yang pertama, cara pandang kedua ini anti terhadap globalisasi. Menurut mereka, globalisasi menyebabkan ketidakmerataan ekonomi, pengangguran, menurunnya program sosial dengan adanya prioritas pemerintah akan daya saing pasar domestik, kejahatan, serta hancurnya budaya lokal (Gilpin dan Gilpin, 2002).

Terkait hal ini, Koentjaraningrat dalam buku "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia"

<sup>8</sup>Globalisasi teknologi dan komunikasi adalah hal yang tidak dapat terlepas dari globalisasi ekonomi. Kesemuanya merupakan elemen-elemen komplementer yang tidak dapat saling menegasikan antarmasing-masing.

menganalisis hubungan antara sistem nilai-budaya dengan pembangunan. Menurutnya, dalam sebuah pembangunan, apapun itu, perhitungan mengenai perkembangan dan efek dalam budaya harus senantiasa diperhatikan. Sistem nilai dan budaya ini dapat diposisikan sebagai pangkal maupun juga sebagai tujuan. Terdapat lima konsep mengenai sistem nilai yang seharusnya digunakan sebagai dasar pembangunan (Koentjaraningrat, 1979). Pertama, kehidupan keseharian masyarakat. Pembangunan harus sesuai dengan pola pikir dan budaya masyarakat setempat. Walaupun nantinya memang ada nilai tambah dalam pengembangan budaya ke arah yang lebih kompleks, perhatian akan hal ini seharusnya menjadi hal utama dalam paradigma pembangunan. Kedua, pembangunan sebagai hasil karya manusia. Dengan ini, pembangunan yang dilakukan jika mengutip konsep demokrasi, adalah pembangunan dari, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ketiga, harmonisasi dengan alam sekitar. Koentjaraningrat menganalisis bahwa pembangunan ekonomi modern yang hanya menitikberatkan teknologi itulah yang akan membuat bangsa kita hanya sebagai bangsa kelas dua yang konsumtif. Keempat, orientasi masa depan. Terakhir, mengedepankan efek perkembangan interaksi dan sistem sosial yang akan terbentuk dengan adanya pembangunan bersangkutan. Dengan adanya kelima hal inilah, lokalitas sebagai tonggak pangkal dan tujuan pembangunan atau perdagangan dapat dicapai.

Bukan menjadi sebuah rahasia lagi bahwa sebuah pembangunan di manapun mempunyai asumsi lokus bidang ekonomi. Ekonom Bangladesh, Anisur Rahman, mengatakan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai pembangunan ekonomi, dan mereduksi tingkat kemajuan dan kematangan dalam masyarakat dengan diukur semata dari tingkat produksinya (Seabrook, 2006). Dalam hubungannya dengan proses globalisasi dan justifikasinya, sebuah pembangunan dan teorinya "menyusupkan" gagasan bahwa negara-negara Dunia Ketiga<sup>9</sup> merupakan negara yang masih "bayi" dan negara yang sudah maju merupakan negara induk yang harus dicontoh. Amerika Serikat merupakan negara yang besar perannya dalam pembangunan teori "developmentalisme" dan modernisasi yang merupakan hasil penelitian dari para pakar ilmu sosialnya. Hal ini merupakan permintaan dari pemerintah Harry S. Truman dengan diselenggarakannya pula *Conference of the Foreign Assistance Act of 1961* (Zein, 1998).

Tugas mereka adalah melakukan studi mengenai bagaimana melahirkan kebijakan *The Foreign of Act of 1966*. *Developmentalism* dan *modernization* pada akhirnya menjadi pilar utama bagi kebijakan program bantuan dan politik luar negeri AS yang menjadi sarana penyebaran "ideologi" kepada negara Dunia Ketiga. Beberapa hal yang patut dicatat dalam pelaksanaan program kerjasama antarpemerintah. Pertama, Amerika menggunakan pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi dan perencanaan Dunia Ketiga. Kedua, pendidikan para tokoh dan pemimpin Dunia Ketiga dalam bentuk training maupun observasi. Ketiga, menggunakan para tokoh agama untuk penyebaran *developmentalism* dan *modernization*. Keempat, mendayagunakan tenaga pendidikan dan riset untuk bekerja di Dunia Ketiga sebagai instrumen USAID secara tersamar (Zein, 1998). Dalam konteks penyebaran "ideologi" ini, invasi lebih cenderung dalam bentuk invasi sosio-kultural, politik, dan kemudian ekonomi. Menjadi rumit ketika IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*) mendukung hal ini dengan kekuatan dana bantuannya.

Ketika suatu kebijakan—yang notabene merupakan parameter dari kedaulatan pemerintahan di mata dunia—disetir oleh segelintir kalangan, maka hal ini merupakan suatu penjajahan baru dengan bentuk yang "lebih ramah". Contohnya adalah *Washington Consensus* yang

<sup>9</sup>Istilah ini digunakan untuk penyebutan negara yang masih terbelakang atau sering dihaluskan dengan istilah negara berkembang.

merupakan resep perbaikan negara ala Neoliberal hasil formulasi ulang oleh Williamson dari realitas di Chile di bawah Pinochet. Istilah Neoliberal tersebut digunakan untuk menandai kebijakan ekonomi Chile yang sepenuhnya diarahkan kepada liberalisasi pasar sebagai respons dari krisis ekonomi warisan rezim sebelumnya (Ali, 2008). *Washington Consensus* ini merupakan sebuah daftar mengenai standar dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh negara-negara di Amerika Latin yang ideal untuk membenahi kondisi ekonomi dalam negerinya yaitu berupa disiplin fiskal, perluasan belanja publik, reformasi perpajakan, liberalisasi finansial, kurs kompetitif, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, privatisasi BUMN, deregulasi, dan perlindungan hak milik (Ali, 2008). Tentunya untuk penguatan posisi tawar, pemberian program bantuan menjadi agendanya.

#### PERSENTUHAN DUA TATANAN: TRADISIONALITAS DAN GLOBALITAS

Pembentukan ekonomi nasional merupakan sebuah proses yang hampir organik. Hal ini dalam artian titik awalnya adalah penggambaran batas-batas nasional, karena memang tanpa batas-batas tersebut itulah aktivitas ekonomi dapat disebut sebagai aktivitas ekonomi nasional. Dalam konteks Asia Tenggara, H. W. Dick menjelaskan bahwa ortodoksi perdagangan bebas Inggris pada abad ke-19 memperkuat tradisi lokal yang jauh lebih tua dan sesungguhnya merupakan subversi dari klaim-klaim teritorial yang ambisius kekuatan Eropa yang lain (Dick, 2002). Dick juga menambahkan bahwa ekonomi nasional bukanlah muncul sebagai evolusi alamiah tetapi sebagai penyimpangan yang tidak alamiah yang dipaksakan oleh kekuatan militer Eropa sejak abad ke-19. VOC, seperti yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, mempunyai sisi determinan dalam pembentukan perekonomian dalam negeri yang ada pada saat ini.

Terlepas dari kontroversi moralitas atas kolonialisme dan VOC, dapat dicermati misalnya saja dari segi infrastruktur yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara. Jalur telegraf dirancang pada tahun 1856 dari Jakarta ke Istana Gubernur-Jenderal di Bogor. Pada 1871, Jawa dihubungkan dengan jaringan internasional lewat Singapura dan secara bertahap jaringan telegraf diperluas ke semua kota penting di Jawa. Pada tahun 1880-an sistem telepon dibangun di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Pada tahun 1899, Jakarta menjadi salah satu kota pertama di dunia yang mempunyai teknologi baru trem listrik (Dick, 2002). Dalam *Nusa Jawa: Silang Budaya karya Lombard*, kita dapat melihat beberapa warisan pemerintahan kolonial dengan *Grote Postweg*, jalan raya lintas Jawa yang dibangun Marsekal Deadeles dari tahun 1808 hingga 1810 dari Anyer sampai Panarukan. Perjalanan dari Batavia (Jakarta) ke Surabaya dapat ditempuh dalam waktu lima hari. Jalur Batavia-Buitenzorg (Bogor pada saat itu) dibuka pada tahun 1873 dan jalur Surabaya-Pasuruan pada tahun 1878, dan setelah pembangunan-pembangunan ini berkembang pula banyak proyek lain menyusul (Lombard, 2008b).

Tetapi, selain beberapa manfaat yang didapat dari "kemurahan hati" pemerintahan kolonial, perlu dilihat juga apa yang sebenarnya hilang dan diambil. Berbagai kebijakan VOC dan kemudian *cultuurstesel*-nya telah mengambil sumberdaya potensial dan strategis dari pribumi untuk keuntungan pemerintah kolonial semata. Politik etis dan program filantropi lainnya pun hanya retorika. Terbukti, politik etis dengan menyekolahkan anak-anak pribumi hanya membuat para *ambtenaar* dan priyayi baru demi kepentingan pemerintah. Dalam retorika program pendidikan kepada anak-anak pribumi pada tahun 1925 misalnya, pengeluaran per kapita hanya sebesar 32 sen, namun pengeluaran untuk pendidikan anak-anak Belanda di Indonesia per kapita sebesar 75 Gulden. Besaran untuk anak-anak Belanda itu kira-kira mencapai 225 kali lipat dari yang dialokasikan bagi anak-anak pribumi. Dengan ketimpangan yang sejauh itu, perbedaan kualitas pendidikan pun

sangat mencolok antara keduanya (Arif, 2006).

Hal tersebut seharusnya secara bijak dapat dianalogikan dengan kondisi seperti sekarang. Betapa negara maju telah dapat mewacanakan bahwasanya program yang mereka berikan merupakan konsep ideal mengenai pembangunan secara universal. Padahal, tidak bisa dilupakan dalam hal apapun, terlebih mengenai pembangunan, aspek lokalitas dan kontekstualitas kewilayahan tidak pernah dapat dikesampingkan serta dianggap general antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tak ubahnya seperti yang dijelaskan Mohtar Mas'ood yang menuliskan bahwa penerapan sistem demokrasi di negara di Afrika yang sangat didukung oleh Amerika dengan berbagai programnya, namun malah terkesan memaksakan dan mengakibatkan beberapa kegagalan bahkan dalam sistem sosial masyarakatnya (Mas'ood, 1999). Tanpa menjadi apatis dengan kebijakan dan komunikasi antarnegara, jangan dilupakan bahwa tidak semua program luar negeri adalah benar-benar kebijakan filantropis yang tidak mempunyai maksud apa-apa di baliknya.

Selanjutnya dapat dilihat bagaimana gerakan ideologi negara maju beserta agendanya. Walaupun pada satu sisi generalisasi lokalitas propaganda paradigma kepada Dunia Ketiga sangat tidak kontekstual, di sini yang lain mekanisme propaganda mengalami proses kontekstualisasi yang sangat hebat. As'ad menilai bahwa pada tingkatan institusi, World Bank memberikan sedikit koreksi: "*New Public Management*" sebagaimana berlangsung di Amerika dan Inggris tidak terlalu dikampanyekan di Dunia Ketiga. World Bank lebih memilih agenda *good governance* dalam rangka memerangi masalah korupsi yang cukup kronis, dan dengan konsep ini, reformasi birokrasi diletakkan dalam hubungan antara masyarakat sipil, bisnis, dan negara, di mana hal-hal seperti ini mengingatkan pada konsep *civil society* (Ali, 2008).

Konsep Eropa tersebut diadopsikan kepada lembaga donor untuk memperkuat agenda demokratisasi negara Dunia Ketiga. Perlu diketahui bahwa dalam propaganda demokratisasi dalam konteks ini—pada beberapa tingkatan merupakan agenda pendukung kebijakan dan program ekonomi-politik negara maju demi invasi pasar yang lebih besar. Secara kasar dapat disimpulkan bahwa demokrasi ala negara maju, yang dipropagandakan dengan banyaknya justifikasi teoritis di satu sisi dan program filantropi di sisi lain, merupakan kegiatan dalam rangka menjaga ruang publik agar tetap sehat dan jauh dari ancaman dominasi (kontrol) satu kekuatan. Dalam konsep ini jelas tampak bahwa peran negara menjadi sangat minim, kebebasan individual menjadi perhatian, dan pada akhirnya *free market* (pasar bebas/global) menjadi instrumen utama.

Beberapa konsep selain demokratisasi yang menjadi agenda lembaga donor internasional tersebut mencakup: pengembangan ekonomi, HAM, lingkungan, kependudukan dan kesehatan, perlindungan konsumen, *good governance*, *civil society*, *gender*, resolusi konflik, dan pluralisme. Lagi-lagi hal ini bersangkutan dengan perdagangan global di mana kapital adalah sebuah faktor determinan untuk tetap bertahan dalam "pertempuran acak satu arena". Dalam kasus ini, perusahaan multinasional (*Multinational Corporations/MNCs*) merupakan sebuah fenomena akhir abad ke-19 yang menjadi *booming* dan kontroversial. Pada perkembangannya di masa sekarang, tak seorang pun dapat menyangkal bahwa MNC telah menjadi ciri esensial ekonomi global dan tidak akan sanggup untuk mengontrolnya. Para penerima investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) bersikap mendua menyangkut kegiatan MNC ini. Di satu sisi mereka menyadari bahwa FDI akan membawa modal dan teknologi ke dalam negeri, namun di sisi lain ada ketakutan-ketakutan akan adanya dominasi dan perkembangan kekuatan yang berlebihan sehingga akan menimbulkan eksploitasi dari perusahaan-perusahaan yang kuat itu (Gilpin dan Gilpin, 2002).

Tabel 2. Jumlah Perusahaan yang Didirikan dan Tingkat Bertahan Hidupnya

Perusahaan	Didirikan	Ada pada tahun 1930	Tingkat bertahan hidup (persen)
Sebelum tahun 1890	383	157	41
1890-1900	982	225	22,9
1900-1909	1630	524	32,1

Pada perkembangannya, di tataran akar rumput, adanya perusahaan MNC mengakibatkan kegiatan perekonomian rakyat menjadi kedatangan "tamu" baru. Sebelum tahun 1850, hanya terdapat 5 korporasi yang didirikan, diantaranya adalah maskapai penerbangan Belanda (NHM) dan Bank Jawa (Javanesche Bank). Terdapat lebih banyak kegiatan pada akhir tahun 1850-an dan 1860-an. Sejak saat itu dan seterusnya, berbagai perusahaan diresmikan badan hukumnya setiap tahun, yang berarti selalu bertambah jumlah perusahaan yang resmi dapat beroperasi di Indonesia. Sesudah tahun 1896, peningkatan terjadi menjadi lebih dari 100 buah perusahaan tiap tahunnya, dan tingkat tertinggi pada tahun 1910 dengan 326 perusahaan baru yang diresmikan. Dalam pembentukannya, terdapat data mengenai tingkat bertahan hidupnya perusahaan pada saat itu yang ditulis A Campo (A Campo, 2002). Namun, walaupun mungkin secara sekilas tingkat bertahan hidup perusahaan yang bermunculan tersebut tidak terlalu tinggi, dengan konsistensi kemunculannya setiap tahunnya, tetap saja menyebabkan dominasi perusahaan yang ada.

Tabel 3. Investasi Gabungan Jepang dalam Pertanian di Indonesia pada Tahun 1939

Region	Jumlah Perusahaan	Investasi (dalam Yen)
Jawa	7	19.987.140
Sumatera	12	32.501.701
Kalimantan	3	16.226.995
Sulawesi dan Irian	5	8.433.153
Jumlah	27	77.151.079

Perusahaan-perusahaan tersebut praktis memakan ranah aktivitas dari kegiatan ekonomi rakyat. Pasar tradisional misalnya, jelas-jelas akan kalah jika disandingkan dalam satu arena dengan perusahaan multinasional yang bermodal besar seperti itu. Konkritnya, dengan modal besar yang menimbulkan konsekuensi penurunan drastis biaya produksi, penjualan komoditas akan dilepaskan dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik pula. Jika pun harga yang ditawarkan sama dengan produk "rakyat" (yang dihasilkan oleh petani domestik misalnya), paling tidak kualitas barang amat berbeda dan pemilihan akan produk MNC menjadi lebih menarik, apalagi jika harga lebih murah. Permasalahan tidak berhenti sampai situ saja. Pelarian kapital dari masyarakat dalam negeri ke luar negeri (tempat asal perusahaan MNC bersangkutan) adalah hal berikutnya yang menjadi kerugian dari negara "boneka". Keuntungan yang besar itu tidak akan berputar dalam negeri melainkan menjadi bagian kapital yang akan terfokus dan kembali datang dalam bentuk invasi produksi yang akan menyingkirkan pasar dan produk domestik sebagai aspek kegiatan subsisten masyarakat.

Dalam hal ini mungkin kita harus mengkritisi fungsi dari pemerintah sendiri menyangkut

Tabel 4. Investasi Swasta Jepang dalam Pertanian di Indonesia pada Tahun 1939

Region	Jumlah Perusahaan	Investasi (dalam Yen)
Jawa	10	421.300
Sumatera	2	2.000
Kalimantan	29	1.063.940
Sulawesi dan Halmahera	13	391.128
Jumlah	54	1.874.368

persoalan perdagangan global dan laju kekuatan kapital tersebut. Adam Smith mempunyai pandangan yang tampaknya bertentangan mengenai fungsi pemerintah. Di satu pihak, demi menjamin hak kebebasan, Smith menolak campur tangan pemerintah atas kegiatan ekonomi. Tetapi, di lain pihak, Smith jelas membela peran pemerintah sebagai penjamin adanya kebebasan tersebut. Dari konsep Smith yang seakan terlihat bertentangan seperti itu menimbulkan beberapa persepsi akan fungsi ideal pemerintah sehubungan dengan mekanisme pasar: (i) pendekatan libertarian anarkistis yang menganggap bahwa Smith menginginkan mekanisme pasar murni tanpa adanya campur tangan pemerintah sama sekali; (ii) pendekatan kelembagaan yang menganggap bahwa Smith menginginkan adanya efek positif dari pengusaha besar bagi masyarakat sekitarnya; dan (iii) pendekatan negara minimal-efektif yang menganggap bahwa Smith menginginkan pengurangan peran pemerintah hanya sampai titik kompromistis tertentu (Keraf, 1996). Dari paparan tersebut, bagaimanapun sebuah pasar bebas akan tetap terbangun. Pasar bebas seakan-akan menjadi sebuah keharusan sejarah di tengah dinamika perkembangan zaman. Pasar bebas sendiri merupakan sebuah tatanan kosmis yang memungkinkan setiap individu untuk mengejar kepentingannya dan kemudian pada nantinya akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pasar bebas itu sendiri (Keraf, 1996).

Dalam bukunya tentang gelombang kapitalisme dunia, Naomi Klein menjelaskan mengenai persoalan lokalitas yang berhadapan dengan globalisasi. *The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism* (Klein, 2007) menjelaskan mengenai bagaimana lokalitas memiliki kekuatan dasar yang membuatnya menjadi tipikal di satu sisi, dan globalisasi dengan kelebihanannya tersendiri di sisi yang lain. Lokalitas memiliki dua sisi dalam persinggungan tersebut; sisi yang kuat dengan ikatan sosialnya, dan sisi lemah jika harus dihadapkan dengan permainan diplomasi elit yang akan "mewakili" tiap-tiap komunitas lokalnya tersebut.

Lokalitas tampaknya menyimpan banyak makna. Etienne Balibar, dalam *Politik and the Other Scene* (Balibar, 2002) berbicara tentang persoalan lokalitas sebagai sebuah kekuatan; dengan catatan, jika dapat memaparkan proses pembentukan ikatannya. Menghubungkannya dengan kekuatan tatanan institusi, Balibar mengatakan bahwa skema-skema tertentu akan selalu mungkin untuk terjadi di sana; entah oleh institusi, kelompok-kelompok atau paling kecil oleh individu-individu (Balibar, 2002). Dalam masyarakat kita, "tamunya baru"-kondisi global dan segala macam institusi pendukungnya—tersebut menjadi lebih kompleks sifatnya dengan kondisi yang membuat tradisionalitas seakan-akan anakronis: sebuah "benda" yang seharusnya tidak pada zamannya.

Neoliberalisme sendiri tidak jauh berbeda dengan liberalisme "klasik" yang menganggap sebuah kebebasan adalah hal mutlak, sampai-sampai sulit dibedakan apakah kebebasan itu merupakan sebuah jalan pencapaian atau tujuannya. Liberalisme klasik Adam Smith diadopsi oleh Amerika Serikat pada era 1800-an hingga 1900-an. Namun, dengan diadopsinya paham ini, pada 1929-1930 dunia mengalami depresi hebat dan kekacauan ekonomi (Ridwan, 2008). John Maynard Keynes muncul sebagai *shock therapy* akan tatanan konsep liberalisme dengan mengeluarkan konsep baru mengenai intervensi negara. Namun, pada dasarnya kesemua hal tersebut dengan segala kerumitannya dapat dijelaskan dengan satu ujung pangkal. Weber, dalam bukunya "Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme", mengatakan bahwa sebuah kondisi kapitalisme merupakan hasil dari beberapa psikologi massa yang telah berkembang (Weber, 2002). Manusia dipenuhi dengan usaha terus-menerus untuk mencapai uang dan harta, dan kesemua hal inilah yang pada akhirnya mengarah kepada kapitalisme (Weber, 2002).

Perkembangan zaman membawa beberapa persoalan yang rumit terkait hidupnya pasar. Pasar sebagai institusi sosial dalam masyarakat yang sekaligus sebagai aktivitas perekonomian kerakyatan, berhadapan dengan perkembangan perspektif mengenai modernitas oleh para pengambil kebijakan. Dawam Rahardjo dan Ignas Kleden mengatakan bahwa telah muncul paradigma teknokrasi dalam mentalitas para pengambil kebijakan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia (Kleden, 2004; Rahardjo, 1984). Perkembangan paradigma tersebut rupanya memang tidak dapat terlepas dengan perkembangan teknologi komunikasi yang mengkondisikan kebutuhan "serba-cepat" dalam segala hal. Mengenai kebutuhan akan adanya kondisi "serba-cepat" tersebut, Thomas L. Friedman menulis *The World is Flat* (Friedman, 2005). Friedman membagi faktor-faktor yang menurutnya berperan dalam proses tersebut: (i) keruntuhan Tembok Berlin, (ii) *web*, (iii) *software* alur kerja, (iv) *uploading*, (v) *outsourcing*, (vi) *offshoring*, (vii) *suply-chaining*, (viii) *insourcing*, (ix) *in-forming*, dan (x) *steroid*.

Namun, persoalan efektivitas dan efisiensi sebenarnya bukan hanya sebatas persoalan ekonomi saja. Charles J. Fox and Hugh T. Miller, dalam tanggapannya mengenai perkembangan bidang-bidang keilmuan dan relativitas batas antar bidang keilmuan mengatakan bahwa diskursus sosio-ekonomi pada akhirnya menjadi hampa di satu sisi, yang membuat kondisi pemerintahan yang buruk di sisi yang lain (Fox dan Miller menyebutnya dengan terkondisikan sebagai *damn gov'ment*). "Efisiensi" dan "efektivitas" pada dasarnya merupakan imaji yang relatif pada setiap tempat dan konteks (Fox dan Miller, 1993). Dalam persoalan ekonomi (pasar dan aktivitas perdagangan, dalam makna yang luas), efektivitas dan efisiensi menjadi relatif.

Persoalan tentang bagaimana mewacanakan konsep-konsep Barat, Mubyarto mengeluarkan kritik yang cukup keras pada beberapa hal terkait kontekstualisasi konsep tersebut di Indonesia. Mubyarto mengatakan bahwa kelemahan mendasar ilmu ekonomi konvensional Barat jika diterapkan di Indonesia adalah ketika menganggap bahwa fenomena ekonomi yang bisa dianalisis hanyalah yang terjadi di pasar atau tentang komoditas yang dipertukarkan di pasar. Lebih fatal lagi jika dibuat model ekonomi (abstrak-matematis) bahwa pasar hanya mengenal dua sektor ekonomi, yaitu produksi (oleh perusahaan) dan konsumsi (oleh rumah tangga) saja. Dengan adanya hal yang seperti ini tentunya tidak akan dikenal adanya pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus (Mubyarto, 2005). Asumsi yang terinternalisasi pada kita sekarang ini adalah "perusahaan-sentris" dengan berbagai kebijakannya yang berfokus kepadanya. Kondisi seperti ini menjadi terlihat seperti sebuah keberhasilan propaganda diskursus Barat terhadap kita. Rente ekonomi terjadi secara samar namun sangat jelas pergerakannya.

## PENUTUP

Indonesia dengan warisan kolonialisme dan politik Orde Baru-nya secara tidak sadar lebih mengutamakan kepada pembangunan ekonomi yang terlalu berlandaskan faktor modal dan teknologi dengan penggunaan paradigma ekonomi finansial, dan ini tentunya jauh dari penguatan ekonomi sektor *grassroot*. Terdapat tiga pendekatan besar dalam pembangunan yaitu paradigma politik, ekonomi dan moral. Yang sangat disayangkan adalah perdebatan berbagai pihak mengenai penggunaan pendekatan pembangunan yang hanya terfokus pada dua pendekatan pertama; dan moral sebagai paradigma pembangunan yang lebih memperhatikan distribusi ekonomi menjadi tidak diprioritaskan. Menjadi sebuah konformitas yang sangat utopis jika yang terus berkembang adalah paradigma-paradigma yang selalu "memfasilitasi" propaganda pasar Dunia Maju. Lokalitas pasar tradisional sebagai penghidupan masyarakat yang sesungguhnya akan tergerus menjadi kondisi di

mana satu kekuatan modal bergerak ke satu titik dan hanya menghidupi segelintir manusia, terbungkus dengan format intelektualitas teoritisnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A Campo, J.N.F.M. (1995). *Munculnya Perusahaan Korporat di Indonesia pada Masa Kolonial, 1893-1913 Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: PSAT UGM dan Pustaka Pelajar.
- Ali, A. S. (2008). *Pergolakan di Jantung Tradisi NU yang Saya Amati*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Arif, S. (2006). *Negeri Terjajah*. Yogyakarta: Resist Book.
- Balibar, E. (2002). *Politik and the Other Scene*. London: Verso.
- Burke, P. (2003). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dick, H.W. (2002). Munculnya Ekonomi Nasional, 1808-1990-an, dalam Lindblad, J. Thomas (Ed.) *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: PSAT UGM dan Pustaka Pelajar.
- Dick, H.W. (1978). The Rise of a Middle Class and the Changing Concept of Equity in Indonesia: An Interpretation. *Makalah*. Australia.
- Fox, C. J., & Miller, H.T. (1993). Postmodern Public Administration: A Short Treatise on Self-Referential Epiphenomena. *Administrative Theory & Praxis*, 15 (1).
- Friedman, T. L. (2005). *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. US: Farrar Strauss and Girroux.
- Gilpin, R., & Gilpin, J.M. (2002). *Tantangan Kapitalisme Global*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartodirdjo, S., Sudewo, A. & Hatmosuprobo, S. (1987). *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- . (1988). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat (Ed.). (1979). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Keraf, S. A. (1996). *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kleden, I. (1984). Model Rasionalitas Teknokrasi. *Prisma*, 3 (8).
- Klein, N. (2007). *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. New York: Henry Holt and Company LLC.
- Lombard, D. (2008a). *Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- . (2008b). *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mas'oed, M. (1999). *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto. (2005). Krisis Ilmu Ekonomi Indonesia, dalam A. B. Lopian, et.al (Ed) *Sejarah dan Dialog Peradaban*. Jakarta: LIPI Press.

- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Post, P. (2002). Karakteristik Kewirausahaan Jepang dalam Ekonomi Indonesia Sebelum Perang, dalam Lindblad, J. Thomas (Ed.) *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: PSAT UGM dan Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, D. (1984). Teknokrasi: Dari Gerakan Sosial ke Dominasi Tekno-Ekonomi. *Prisma*, 3 (8).
- Ridwan, N. K. (2008). *NU dan Neoliberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*. Yogyakarta: LKiS.
- Salim, A. (2008). *Pengantar Sosiologi Mikro*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Seabrook, J. (2006). *Kemiskinan Global Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme*. Yogyakarta: Resist Book.
- Wibawa, S. (2001). *Negara-Negara di Nusantara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Weber, M. (2002). *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Prometheus.
- Zein, M. A. (1998). Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Tim Kahmi Jaya (Ed) *Indonesia di Simpang Jalan*. Bandung: Mizan.